



RILIS
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI XII DPR RI
KE PT IWIP, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,
PROVINSI MALUKU UTARA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025
9 Desember 2024

Komisi XII DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja reses ke PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 16 hingga 18 Desember 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasan khususnya terkait tata kelola pertambangan. Dalam konteks ini, pengembangan kawasan IWIP telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2020, sehingga perlu pengawasan yang lebih intens.

Selama kunjungan, Komisi XII DPR RI melakukan pertemuan dengan berbagai mitra antara lain Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup RI, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Hilirisasi/ BKPM, Direksi PT IWIP, dan Direksi PT Weda Bay Nikel (WBN). Pertemuan ini bertujuan untuk mendalami tata kelola penambangan ore dan penjualan produk akhir smelter oleh PT WBN maupun PT IWIP.

Selama kunjungan berlangsung, Komisi XII DPR RI menemukan berbagai ketidakpatuhan regulasi yang dilakukan oleh manajemen PT WBN maupun PT IWIP. Beberapa hasil temuan yang didapatkan oleh Komisi XII DPR RI antara lain PT WBN terindikasi melakukan penambangan ore secara ilegal selama RKAB belum diterbitkan. Hal ini juga diperkuat dengan banyaknya tumpukan ore di *stock pile* yang mencapai sekitar 17 juta ton. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak berfungsinya jembatan timbang, sehingga ada indikasi data-data produksi yang ada dimanipulasi. Temuan lain yang patut menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian pengelolaan lingkungan secara teknis, khususnya manajemen air limbah yang tidak mematuhi standar operasional. Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI juga menyoroti belum adanya tata kelola niaga produk smelter melalui jalur darat.

“Selama ini, Ditjen Minerba KESDM RI sangat kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap penjualan produk smelter melalui jalur darat. Hal ini tentunya berpotensi merugikan negara akibat penerimaan negara yang tidak bisa optimal. Pemerintah perlu memikirkan pembuatan regulasi khusus terkait hal ini”, tegas Bambang Haryadi selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI.